

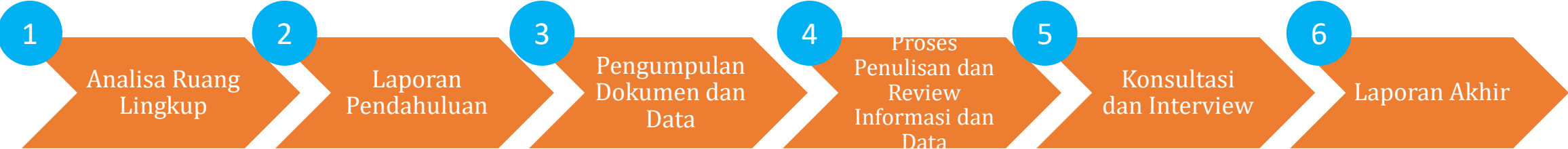
Inception Report

Pelaporan EITI Indonesia
2015

AGENDA

- Pendekatan dan Metodologi
- Ruang Lingkup Laporan EITI 2015
- Hasil Kerja dan Tanggal Kunci
- Permasalahan dan Rekomendasi
- Status Rekonsiliasi Migas dan Minerba

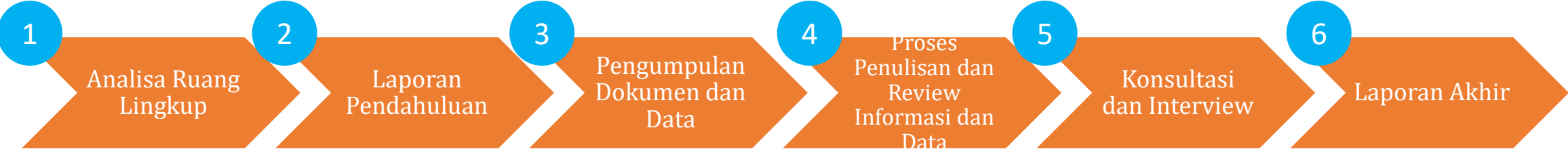
Pendekatan dan Metodologi Laporan Kontekstual



No	Kegiatan
1	- Matrix antara EITI standard dengan topik yang disetujui dalam TOR (Lampiran 4. 1) - Daftar masukan Tim Pelaksana dalam rapat sebelum Laporan ini disusun dan masukan IA - Daftar isi/topik dari Laporan Ruang Lingkup 2015 yang telah diperbaharui seusai dengan analisa poin b. (Lampiran 4.2)
2	Penyusunan Laporan Pendahuluan/Inception Report
3	Dokumen dan data berasal dari sumber terpercaya seperti kementerian – kementerian, Badan Statistik, universitas atau lembaga peneliti, lembaga swadaya masyarakat, lembaga internasional, perusahaan, sumber perorangan yang ahli di bidangnya (Lampiran 3)
4	Pengolahan data dilakukan sebagai berikut : Data kuantitatif : - Disarikan dalam tabulasi - Penyajian data dalam bentuk yang mudah dibaca dan menarik. Penyajian data yang dimaksud dapat berupa tabel, grafik atau gambar. Informasi kualitatif : - Membuat ikhtisar dari sumber terpercaya lalu - Mengkonfirmasi ikhtisar ke lebih dari 1 sumber yang berbeda

Pendekatan dan Metodologi

Laporan Kontekstual - Lanjutan



No	Kegiatan
5	• Penjelasan jika terdapat informasi yang tidak jelas atau saling bertentangan dari poin 4 • Data dan informasi diakibatkan tidak tersedianya data di publik • Masukan terutama mengenai tantangan dan deviasi dari peraturan tata kelola, kebijakan perpajakan serta isu terkini dalam industri ekstraktif (Lampiran 5)
6	Penyusunan Laporan Kontekstual EITI Indonesia Tahun 2015

Pendekatan dan Metodologi

Laporan Kontekstual - Lanjutan

No	Nama Instansi	Tanggal (rencana)*
1	SKK Migas	Minggu ke-1, Oktober
2	PPID ESDM	Minggu ke-2, Oktober
3	Ditjen Minerba, KESDM	Minggu ke-2, Oktober
4	Ditjen Migas, KESDM	Minggu ke-2, Oktober
5	APBI	Minggu ke-3, Oktober
6	Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu	Minggu ke-3, Oktober
7	PWYP	Minggu ke-3, Oktober

*tergantung jadwal masing-masing pihak
IA memerlukan surat pengantar/tugas dari Kemenko

RUANG LINGKUP

Laporan Kontekstual

Index Bab	Judul Bab/Sub Bab	EITI Standard 2016
1	Pendahuluan	
2	Tata Kelola Industri Ekstraktif	2.1
2.1	Amanat Konstitusi Undang – Undang 1945	2.1
2.2	Kebijakan Fiskal Migas dan Minerba di Indonesia	2.1
2.3	Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah yang Terkait dalam Industri Ekstraktif	2.1
2.4	Tantangan dan Isu Terkini Terkait Industri Ekstraktif	2.1, 2.5
3	Perizinan dan Kontrak	2.2, 2.3 & 2.4
3.1	Sistem Kontrak dan Perizinan Industri Ekstraktif	2.4
3.2	Proses Penetapan dan Tender Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi	2.2 & 2.3
3.3	Proses Penetapan dan Pemberian Izin Wilayah Pertambangan Minerba	2.2 & 2.3
3.4	Tantangan dan Isu Terkini Terkait Proses Lisensi di Industri Ekstraktif	2.2 & 2.3
4	Kontribusi Industri Ekstraktif di Indonesia	6.3
4.1	Industri Ekstraktif di Indonesia dalam Konteks Global	6.3
4.2	Sebaran dan Potensi Industri Ekstraktif di Indonesia	6.3
4.3	Kontribusi PDB Migas dan Pertambangan di Indonesia	6.3
4.4	Penerimaan Negara dari Migas dan Minerba	4.1, 4.4 & 6.3
4.5	Produksi Migas dan Minerba	3.2 & 6.3
4.6	Kontribusi Ekspor Migas dan Minerba	3.3 & 6.3

RUANG LINGKUP

Laporan Kontekstual

Index Bab	Judul Bab/Sub Bab	EITI Standard 2016
4.7	Kegiatan Eksplorasi yang Signifikan	3.1
4.8	Kontribusi Industri Ekstraktif pada Lapangan Kerja Nasional	6.3
4.9	Dampak Industri Ekstraktif di Daerah : Beberapa Studi	6.3
5	Badan Usaha Milik Negara	2.6, 4.5 & 6.2
5.1	Hubungan BUMN dan Pemerintah	2.6, 4.5 & 6.2
5.2	PT Pertamina (Persero)	
5.3	PT Aneka Tambang (Persero) Tbk	2.6, 4.5 & 6.2
5.4	PT. Bukit Asam (Persero) Tbk	2.6, 4.5 & 6.2
5.5	PT Timah (Persero) Tbk	2.6, 4.5 & 6.2
5.6	Rencana Pembentukan BUMN Holding	
6	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	6.1
6.1	Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (CSR)	6.1
6.2	Pertambangan Migas: Abandonment and Site Restoration Fund (ASR Fund)	6.1
6.3	Pertambangan Minerba: Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pasca Tambang	6.1
6.4	Analisa Dampak Sosial dan Lingkungan	6.1
7	Pengelolaan Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif	5.1
7.1	Proses Perencanaan, Penganggaran dan Audit	5.3
7.2	Transfer dan Pembayaran Kepada Daerah	5.2
7.3	Pembayaran dari Perusahaan Migas dan Minerba kepada Pemerintah Daerah	4.6

RUANG LINGKUP

Tantangan dan Isu di Industri Ekstraktif

✓ Migas

- Kegiatan eksplorasi yang kurang untuk menggantikan cadangan minyak yang sudah diproduksi
- Peraturan skema gross split
 - Permen ESDM No. 52/2017 cukup memberikan reaksi positif bagi iklim investasi
 - Akan tetapi, pengaturan perpajakan dengan skema Gross Split belum diatur
- Status terkini revisi UU Migas

✓ Minerba

- Penertiban IUP dan status CNC
- Implementasi pengalihan CoW dan PKP2B ke IUP
- Implementasi peraturan divestasi saham
- Jaminan reklamasi dan paska tambang (peraturan dan implementasi)
- Status terkini revisi UU Minerba
- Posisi Minerba sebagai Biller atas PNBPN Minerba (Berkaitan dengan verifikasi produksi terhadap PNBPN, apakah sudah sesuai atau perlu adanya investigasi)

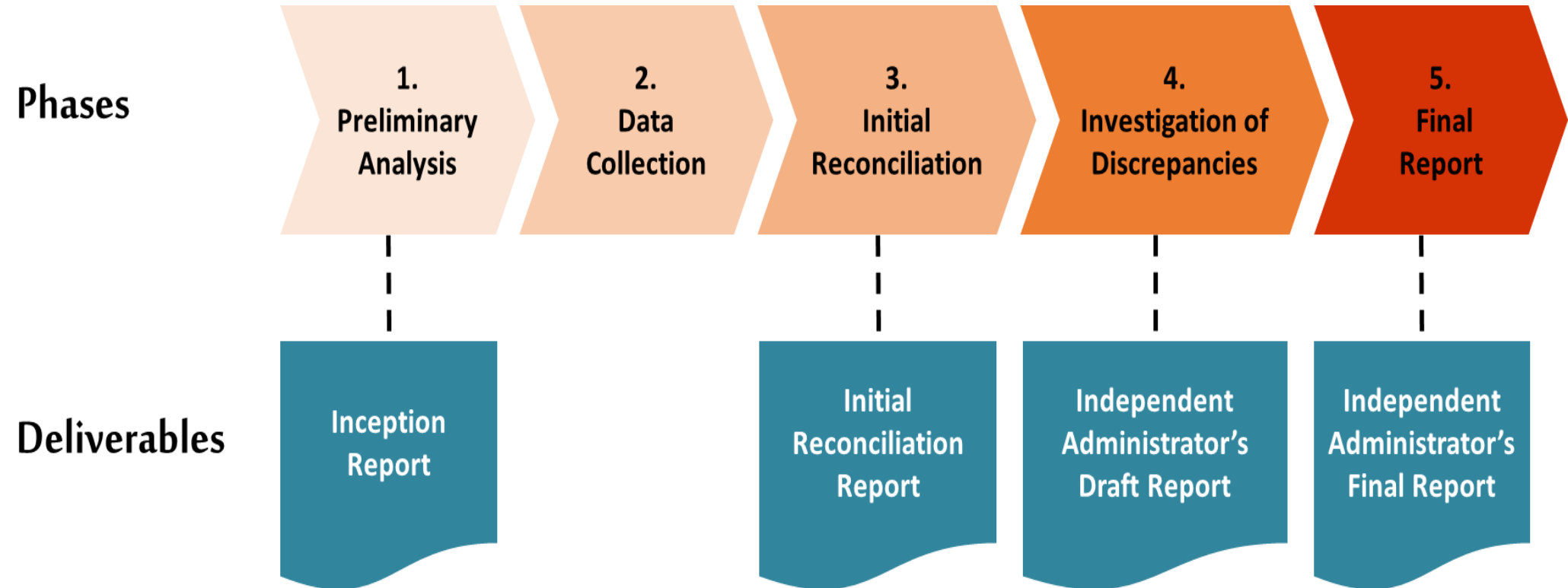
✓ Lain – lain

- Dampak industri ekstraktif di daerah (Riau, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua)
- Dana cadangan migas atau *petroleum fund*
- *Pembentukan BUMN holding untuk pertambangan*

Status Pelaksanaan Masukan dan/atau Saran dari Pelaksanaan Rapat Tim Pelaksana (Ratimlak)

Periode Ratimlak	No.	Masukkan dan/atau saran dalam Laporan EITI 2015	Status per awal Oktober
22 April 2017	1.	Rekonsiliasi Iuran Tetap	Sudah dimasukkan dalam formulir pelaporan
	2.	Keterbukaan Informasi Publik - Perizinan & Kontrak	IA meminta hasil kepekatan rapat antara Sekretariat EITI dengan PPID, sebelum menindaklanjuti poin-poin tersebut
	3.	Gambaran Proses ekstraktif industri Minerba dari Hulu sampai Hilir (smelter)	Brief value chain akan digambarkan dalam laporan Kontekstual hanya tidak akan mendetail sampai ke pendapatan
22 Agustus 2017	1.	Dana Pasca Tambang dan Jaminan Reklamasi	Sudah dimasukkan dalam formulir pelaporan
	2.	Gambaran Proses ekstraktif industri Migas dari Hulu sampai Hilir	Issue sudah dimasukkan dalam laporan, baik laporan pendahulu maupun laporan kontekstual (lihat poin 3 diatas)
	3.	Dampak Industri Ekstraktif terhadap kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat	Issue sudah dimasukkan dalam laporan kontekstual, namun kami hanya menggambarkan pada informasi -informasi yang bersifat kuantitatif seperti PDRB, nilai & volme ekspor, penyerapan tenaga kerja, DBH dan CSR yang sudah dilaksanakan oleh Perusahaan ekstraktif

Pendekatan dan Metodologi Laporan Rekonsiliasi



RUANG LINGKUP

Laporan Rekonsiliasi

Index Bab	Judul Bab/Sub Bab	EITI Standard 2016
1	Latar Belakang	
2	Ruang Lingkup Rekonsiliasi	
2.1	Penerimaan Negara	
2.1.1	Penerimaan Negara yang Direkonsiliasi	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
2.1.2	Penerimaan Negara yang Tidak Direkonsiliasi	4.1, 4.6, 6.1, 6.2
2.1.3	Penerimaan Negara dari Industri Ekstraktif	4.2
2.1.4	Penyediaan Infrastruktur dan Pengaturan Barter	4.3
2.1.5	Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	6.1, 6.2
2.1.6	Transportasi	4.4
2.1.7	BUMN di Industri Ekstraktif	4.5
2.1.8	Pembayaran Langsung Perusahaan ke Pemerintah Daerah	4.6
2.1.9	Penerimaan Negara Lainnya	4.1
2.2	Perusahaan yang Direkonsiliasi	
2.2.1	Minyak dan Gas Bumi	2.3, 2.5
2.2.2	Mineral dan Batubara	2.3, 2.5
3	Metodologi	
3.1	Metode Rekonsiliasi	4.8, 4.9
3.2	Aktivitas dan Fokus dari Rekonsiliasi	4.8, 4.9
3.2.1	Penyusunan Format Pelaporan	4.8, 4.9
3.2.2	Distribusi Format Pelaporan ke Perusahaan dan Instansi Pemerintah	4.8, 4.9
3.2.3	Daftar Perusahaan yang Tidak Melapor	4.8, 4.9
3.2.4	Proses Rekonsiliasi	4.8, 4.9

RUANG LINGKUP

Laporan Rekonsiliasi

Index Bab	Judul Bab/Sub Bab	EITI Standard 2016
3.2.5	Kesulitan Pengumpulan Data	4.8, 4.9
3.2.6	Kerahasiaan Data	4.8, 4.9
3.2.7	Tidak Adanya Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Melapor	4.8, 4.9
4	Hasil Rekonsiliasi	
4.1	Perusahaan Migas	
4.1.1	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan SKK Migas	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
4.1.2	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Migas	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
4.1.3	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Migas dengan Ditjen Anggaran	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
4.1.4	Penerimaan Negara yang Dikelola SKK Migas dan Diterima oleh Ditjen Anggaran	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
4.1.5	Laporan Penerimaan Negara dan Daerah yang Disajikan Satu Sisi Perusahaan	4.1
4.2	Perusahaan Minerba	
4.2.1	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Minerba	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
4.2.2	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Pajak	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
4.2.3	Rekonsiliasi Antara Perusahaan Minerba dengan Ditjen Anggaran	3.2, 4.1, 4.2, 4.5
4.2.4	Rekonsiliasi Antara PT Bukit Asam (Persero), Tbk. dengan PT Kereta Api	4.4
4.2.5	Laporan Penerimaan Negara dan Daerah yang Disajikan Satu Sisi Perusahaan	4.1
5	Penyaluran Dana Hasil Penerimaan Industri Ekstraktif dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah	
5.1	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	4.6
5.2	Alokasi Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah	5.1, 5.2
5.2.1	Skema Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dan Minerba	5.1, 5.2
5.2.3	Daerah Penghasil	5.1, 5.2
6	Prosedur Audit dan Asuransi	4.9
7	Temuan dan Rekomendasi	4.9

Hasil Kerja dan Tanggal Kunci

Hasil Kerja	Tanggal
Kick off meeting bersama Tim Pelaksana	22 Agustus
Sosialisasi Pengisian Formulir Pelaporan	29 Agustus dan 6 September
Batas akhir penyampaian formulir EITI oleh Perusahaan	20 September
Laporan Pendahuluan	25 September
Persetujuan Inception Report	3 Oktober
Batas Akhir Rekonsiliasi (Lock Angka)	1 November
Penyampaian Draft Laporan IA	3 November
Rapat Tim Pelaksana untuk Masukan atas Draft Laporan IA	10 November
Penyampaian Final Draft oleh IA	23 November
Rapat MSG persetujuan Laporan EITI	30 November
Rapat MSG persetujuan laporan EITI	7 Desember
Penyerahan laporan EITI dan tagihan oleh IA	14 Desember
Launching laporan EITI 2015	20 Desember
Upload laporan EITI ke Web	20 Desember

Permasalahan dan Rekomendasi dalam penyusunan Laporan oleh IA

Laporan Kontekstual

Keterbatasan akses publik terhadap beberapa informasi yang disyaratkan dalam standar EITI Internasional

Beberapa informasi yang disyaratkan dan disarankan oleh standar EITI Internasional tidak dapat diakses publik misalnya mengenai a. informasi kadasteral b. isi kontrak kerjasama, c. peserta tender, d. nilai produksi untuk mineral dan batubara, e. beneficial ownership (disarankan).

Mitigasi:

- IA melakukan penilaian penyebab dari hambatan pengungkapan informasi-informasi tersebut
- IA meminta tanggapan kepada Tim Pelaksana mengenai informasi apa saja yang dapat diungkapkan jika informasi tersebut tidak dapat diungkapkan karena terbatas oleh regulasi

Status Penerimaan Laporan dari Perusahaan Migas

Sampai dengan 2 Oktober 2017

STATUS	Operator		Partner	
Sudah lapor	53	77%	56	57%
Belum Lapor	14	20%	43	43%
Tutup / Pailit*	2	3%	0	-
Total	69	100%	99	100%

*) Petroselat, Ltd. (Blok Selat Panjang) & PT Sumatera Persada Energy (Blok West Kampar)

Status Penerimaan Laporan dari Perusahaan Minerba

Sampai dengan 2 Oktober 2017

STATUS	PKP2B	KK-Mineral	IUP Batubara & IUP Mineral	Total	
Sudah lapor	10	5	19	34	28%
Dapat dihubungi	22	2	51	75	61%
Belum dapat dihubungi	3	-	8	11	9%
Tidak berproduksi	-	-	3	3	2%
Total	35	7	81	123	100%



Terima Kasih